

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2021**

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021



**BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

Jl. Tentara Pelajar No. 10. Bogor (16114) Jawa Barat

Telepon (0251) 8351277 – Faxsimile (0251) 8350928
E-mail:bbp2tp@litbang.deptan.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Bogor, 31 Desember 2021



Dr. Ir. Ferry Fahrudin Munier, M.Sc., IPU
NIP. 19660106 199303 1 001

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.1.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.1.3. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Peralatan dan Mesin

C.2.2. Gedung dan Bangunan

C.2.3. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.4. Aset Tetap Lainnya

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Piutang Jangka Panjang

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.3.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.4. Aset Lainnya

C.4.1. Aset Lain-lain

C.4.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.5.1. Pendapatan Diterima Dimuka

C.6. Ekuitas

C.6.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

D.4. Beban Barang dan Jasa

D.5. Beban Pemeliharaan

- D.6. Beban Perjalanan Dinas
- D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
- D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
- D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi
- D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
- D.11. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bogor, 31 Desember 2021

Kepala Balai Besar,



Dr. Ir. Feby Fahrudin Munier, M.Sc., IPU

NIP. 19660106 199303 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp255,635,558.00 atau mencapai 786.57% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp32,500,000.00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp22,583,001,330.00 atau mencapai 98.19% dari alokasi anggaran sebesar Rp22,999,744,000.00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp15,856,836,752.00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp31,285,435.00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp15,712,161,117.00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp113,390,200.00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp19,829,333.00 dan Rp15,837,007,419.00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp72,641,000.00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp23,562,305,760.00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-23,489,664,760.00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp202,038,558.00 dan Defisit Rp0.00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-23,287,626,202.00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp18,292,844,358.00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-23,287,626,202.00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp-1,495,576,509.00 dan

ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp22,327,365,772.00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp15,837,007,419.00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020**

Uraian	Catatan	31 Desember 2021			31 Desember 2020
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	32,500,000.00	255,635,558.00	786.57	475,572,747.00
Jumlah Pendapatan		32,500,000.00	255,635,558.00	786.57	475,572,747.00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	8,220,713,000.00	7,948,559,030.00	96.69	8,238,329,393.00
Belanja Barang	B.4.	14,359,344,000.00	14,217,695,300.00	99.01	11,676,377,002.00
Belanja Modal	B.5.	419,687,000.00	416,747,000.00	99.30	626,890,000.00
Jumlah Belanja		22,999,744,000.00	22,583,001,330.00	98.19	20,541,596,395.00

II. NERACA

BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET			
Aset Lancar			
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.1.	22,013,000.00	36,960,000.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.2.	-110,065.00	-184,800.00
Persediaan	C.1.3.	9,382,500.00	26,635,700.00
Jumlah Aset Lancar		31,285,435.00	63,410,900.00
Aset Tetap			
Peralatan dan Mesin	C.2.1.	14,236,513,416.00	14,009,250,416.00
Gedung dan Bangunan	C.2.2.	15,347,212,515.00	16,204,188,515.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.3.	1,544,823,300.00	1,544,823,300.00
Aset Tetap Lainnya	C.2.4.	442,324,564.00	442,324,564.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.5.	-15,858,712,678.00	-14,030,723,204.00
Jumlah Aset Tetap		15,712,161,117.00	18,169,863,591.00
Piutang Jangka Panjang			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.1.	113,960,000.00	113,960,000.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.2.	-569,800.00	-569,800.00
Jumlah Piutang Jangka Panjang		113,390,200.00	113,390,200.00
Aset Lainnya			
Aset Lain-lain	C.4.1.	302,268,800.00	302,268,800.00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.2.	-302,268,800.00	-302,268,800.00
Jumlah Aset Lainnya		0.00	0.00
Jumlah Aset		15,856,836,752.00	18,346,664,691.00
Kewajiban Jangka Pendek			
Pendapatan Diterima Dimuka	C.5.1.	19,829,333.00	53,820,333.00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		19,829,333.00	53,820,333.00
Jumlah Kewajiban		19,829,333.00	53,820,333.00
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.	15,837,007,419.00	18,292,844,358.00
Jumlah Ekuitas		15,837,007,419.00	18,292,844,358.00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		15,856,836,752.00	18,346,664,691.00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020**

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	72,641,000.00	62,366,000.00
JUMLAH PENDAPATAN		72,641,000.00	62,366,000.00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	7,948,559,030.00	8,238,329,393.00
Beban Persediaan	D.3.	2,014,145,427.00	1,444,663,861.00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	6,666,038,463.00	5,917,188,257.00
Beban Pemeliharaan	D.5.	1,573,092,545.00	1,605,895,950.00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	3,981,672,065.00	2,741,595,774.00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	0.00	1,908,281,769.00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.8.	0.00	271,500,000.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9.	1,378,872,965.00	1,685,365,471.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10.	-74,735.00	754,600.00
JUMLAH BEBAN		23,562,305,760.00	23,813,575,075.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-23,489,664,760.00	-23,751,209,075.00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11.	67,144,773.00	0.00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11.	134,893,785.00	584,288,837.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11.	0.00	21,527,500.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		202,038,558.00	562,761,337.00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-23,287,626,202.00	-23,188,447,738.00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020**

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
EKUITAS AWAL	E.1.	18,292,844,358.00	21,428,464,712.00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-23,287,626,202.00	-23,188,447,738.00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	-1,495,576,509.00	-13,196,264.00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.1.	-1,495,576,509.00	-13,196,264.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	22,327,365,772.00	20,066,023,648.00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	-2,455,836,939.00	-3,135,620,354.00
EKUITAS AKHIR	E.6.	15,837,007,419.00	18,292,844,358.00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai visi “Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”

Balai Besar Pengkajian dan Teknologi Pertanian atau lebih dikenal sebagai BB Pengkajian merupakan salah satu unit kerja Badan Litbang Pertanian yang memiliki tugas utama untuk melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian sesuai dengan peraturan menteri pertanian nomor No.39/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja BBP2TP.

Selain tugas utama tersebut, Kepala Badan Litbang Pertanian juga memberikan mandat untuk membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengkajian, pengembangan dan perakitan teknologi spesifik lokasi yang dilakukan oleh BPTP serta mempercepat pemasyarakatan inovasi teknologi yang telah dihasilkan oleh unit kerja/unit pelaksana teknis lingkup Badan Litbang Pertanian. Fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap BPTP dilaksanakan oleh BB Pengkajian dengan memanfaatkan jaringan penelitian dan pengembangan lingkup Badan Litbang Pertanian dan lembaga litbang lainnya.

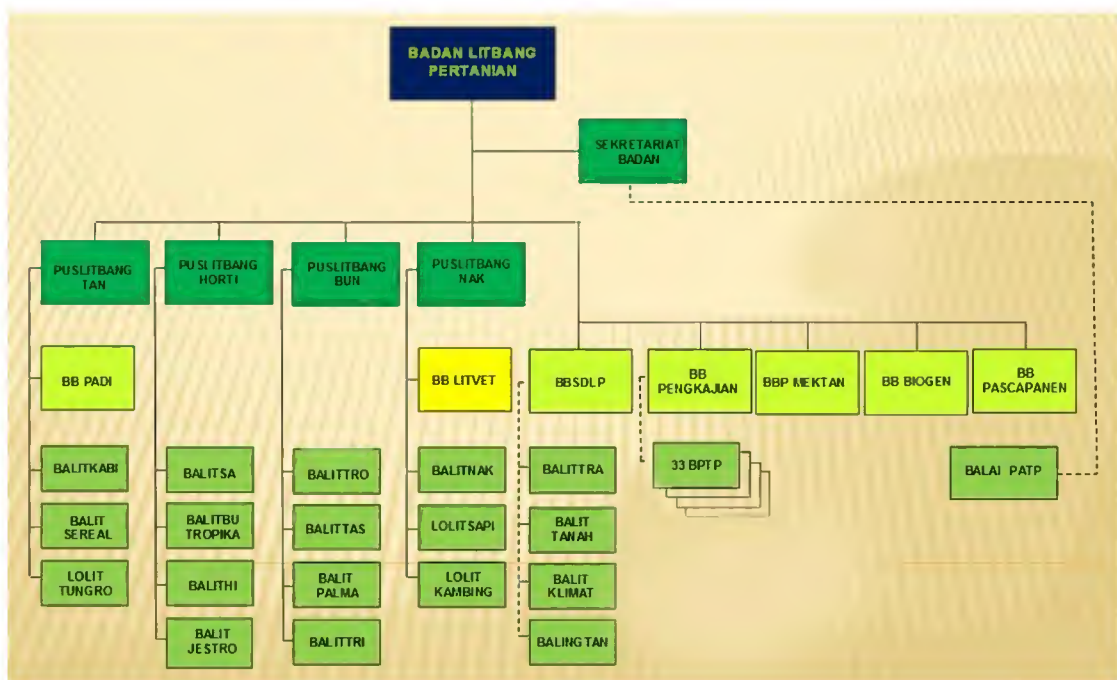
Inovasi Pertanian merupakan komponen kunci dalam pembangunan pertanian, terutama dalam menghadapi kondisi sumberdaya yang semakin terbatas serta perubahan iklim global. Perubahan lingkungan strategis serta respon terhadap perubahan strategi pembangunan pertanian nasional, menuntut ketersediaan inovasi pertanian yang semakin meningkat. BBP2TP sebagai institusi yang mendapatkan tugas untuk melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian, memiliki ruang yang luas untuk berkiprah dalam mendukung pembangunan pertanian.

Merespon tantangan di atas dan memperhatikan tumbuh kembangnya institusi BBP2TP diperlukan arahan untuk lebih memfokuskan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengkajian dan diseminasi teknologi spesifik lokasi, khususnya pada periode tahun 2020-2024 yang merupakan perwujudan dari visi, misi, strategi dan kegiatan lingkup BBP2TP sangat diperlukan sebagai dokumen perencanaan pengkajian dan pengembangan teknologi serta inovasi pertanian spesifik lokasi. Penajaman dan penyesuaian restra 2020-2024 ini juga merespon dinamika kebijakan dan prioritas program Balitbangtan dalam mendukung rencana pembangunan jangka menengah 2020-2024 kementan, dimana pembangunan pertanian diarahkan untuk dapat menjamin ketahanan pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional.

Sesuai dengan semangat reformasi dan perubahan birokrasi, setiap unit kerja/unit pelaksana teknis (UK/UPT) dituntut untuk memiliki standard performance sesuai standar mutu dalam pelayanan terhadap masyarakat, serta mempunyai konsistensi

dan komitmen terhadap mutu manajemen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dengan baik. Lebih lanjut, restra diarahkan demi terlaksananya pemanfaatan sumberdaya spesifik wilayah yang berbasis inovasi dengan kualitas produk pertanian yang optimal dan bernilai tambah, serta bermuara pada tercapainya kesejahteraan petani. Struktur restra ini, secara komprehensif dijabarkan dalam visi, misi, tujuan, indikator kinerja, dan sasaran serta arah kebijakan dan strategi. Penajaman restra ini tetap berpegang pada koridor tugas pokok dan fungsi utama yang diemban BBP2TP untuk melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian seperti tertuang dalam peraturan menteri pertanian no.39/permentan/OT.140/3/2013, serta tugas khusus sebagai koordinator dan Pembina BPTP sebagaimana tertuang dalam surat keputusan kepala Balitbangtan No.344/Kpts/OT.140/J/12/2005.

Inovasi Teknologi dan pengembangan kelembagaan, namun juga strategi kebijakan dan penyusunan panduan operasional berbagai kegiatan. Dokumen restra BBP2TP merupakan acuan dan arahan bagi BPTP dalam merencanakan dan melaksanakan pengkajian dan diseminasi inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi periode 2020 – 2024 secara menyeluruh, terintegrasi dan sinergis baik internal Balitbangtan maupun dengan stakeholder di wilayah.

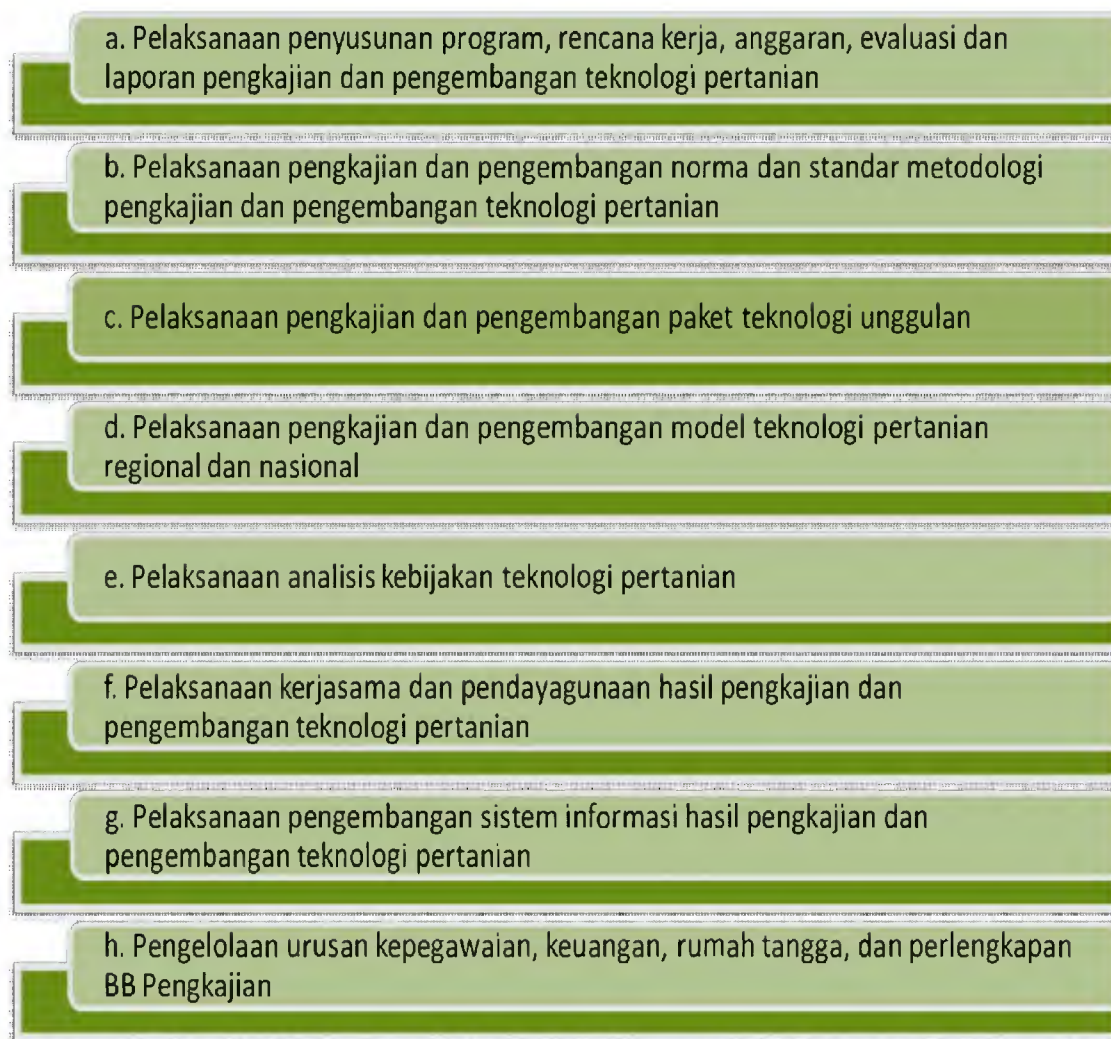


Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Organisasi dan Tata Kelola

Landasan Hukum :

Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) BBP2TP manguku pada Permentan 39/Permentan/OT.140/3/2013 seperti disajikan pada gambar 1. Dalam menjalankan Lankannya, BBP2TP diperkuat dengan surat Keputusan Kepala Balitbangtan No.344/Kpts/OT.140/J/12/2005 dalam mengkoordinasikan dan membina 33 BPTP untuk cakupan 34 Provinsi secara nasional.



Gambar 2. Fungsi dan diselanggarakan BBP2TP

STRUKTUR ORGANISASI & SDM

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BB Pengkajian) adalah Unit Kerja yang mengkoordinasikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) terbesar, yaitu 33 UPT (BPTP). BB Pengkajian harus bertindak sebagai koordinator BPTP yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dan sekaligus sebagai integrator program penelitian, pengkajian, pengembangan, dan penerapan (litkajibangrap) mendukung Program Strategis Pembangunan Pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.39/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja BB Pengkajian, tugas utama BB Pengkajian adalah melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BB Pengkajian menyelenggarakan fungsi: (a) Perumusan program dan evaluasi pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian, (b) Pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan hasil pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian, (c) Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan norma dan standar metodologi pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian, (d) Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan paket teknologi unggulan, (e)

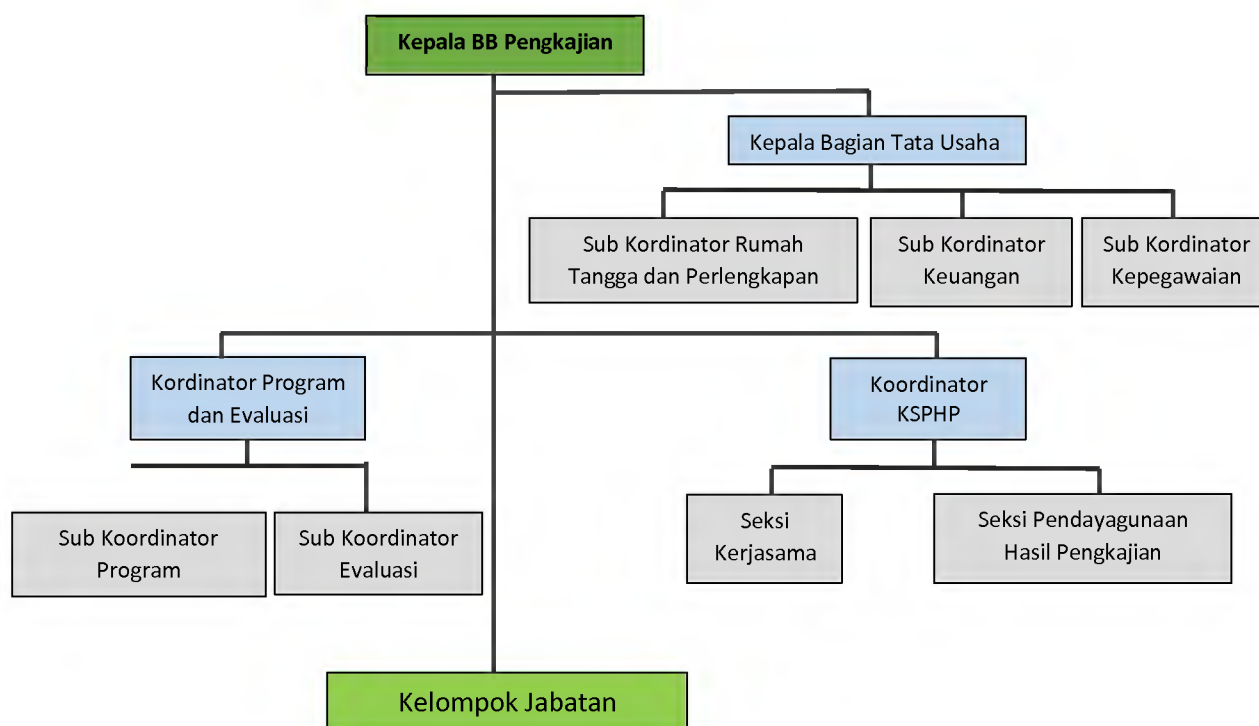
Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan model teknologi pertanian regional dan nasional, dan (f) Pengelolaan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

Disamping melaksanakan tugas pokok seperti yang diuraikan di atas, sesuai dengan keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian No. 161/2006, BB Pengkajian diberi mandat untuk membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, dan perakitan teknologi spesifik lokasi yang dilakukan oleh BPTP, serta mempercepat pemasyarakatan inovasi teknologi yang telah dihasilkan oleh Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UK/UPT) lingkup Badan Litbang Pertanian.

Pemberian mandat BB Pengkajian untuk melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap BPTP terkait erat dengan tekad Badan Litbang Pertanian untuk mengakselerasi pemasyarakatan inovasi teknologi pertanian yang telah dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian maupun lembaga penelitian dan pengembangan lain yang ada di Indonesia.

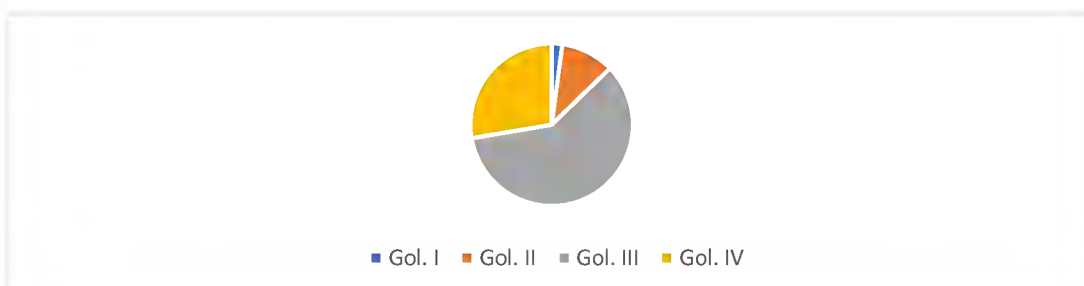
Fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap BPTP dilaksanakan BB Pengkajian dengan memanfaatkan jaringan penelitian dan pengembangan lingkup Badan Litbang Pertanian dan lembaga litbang lainnya. Selain itu, BB Pengkajian juga berperan dalam pembinaan pengembangan sumberdaya manusia (termasuk pembinaan karier struktural dan fungsionalnya) serta melakukan koordinasi dan pembinaan dalam publikasi hasil-hasil penelitian/pengkajian yang dihasilkan BPTP.

Susunan Organisasi BB Pengkajian antara lain : Pimpinan tertinggi adalah Kepala Balai Besar Pengkajian membawahi Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Pengkajian. Kepala Bagian Tata Usaha membawahi Kasubbag Keuangan, Kasubbag Kepegawaian dan Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan. Kepala Bidang Program dan Evaluasi membawahi Kasie Program dan Kasie Monitoring dan Evaluasi. Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Pengkajian membawahi Kasie Kerjasama dan Kasie Pendayagunaan Hasil Pengkajian. Kelompok Jabatan Fungsional berada langsung dibawah Kepala BB Pengkajian.



SUMBER DAYA MANUSIA

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan potensi yang utama untuk mendukung suatu organisasi sesuai dengan keterampilan atau kemampuan yang dimiliki. Jumlah pegawai BB Pengkajian per 30 Juni 2021 sebanyak 92 orang terdiri dari 26 orang golongan IV, 53 orang golongan III, 11 orang golongan II dan 2 orang golongan I dengan keragaan berdasarkan kepangkatan dan golongan yaitu :



Berdasarkan kelompok jabatan fungsional pegawai BB Pengkajian per 31 Desember 2021 terdiri dari :

Kelompok Jabatan Fungsional	Jumlah (Orang)
1. Peneliti	30
- Peneliti Utama	7
- Peneliti Madya	9
- Peneliti Muda	9
- Peneliti Pertama	5
2. Penyuluh	11
- Penyuluh Utama	1
- Penyuluh Madya	1
- Penyuluh Muda	6
- Penyuluh Pertama	2
- Calon Penyuluh	1
3. Analis Kepegawaian	6
- Analis Kepegawaian Madya	1
- Analis Kepegawaian Muda	3
- Analis Kepegawaian Terampil	2
4. Analis Pengelolaan Keuangan	3
- Analis Pengelolaan Keuangan Madya	1
- Analis Pengelolaan Keuangan Muda	2
5. Analis Perencana	3
- Analis Perencana Madya	1
- Analis Perencana Muda	2
6. Pranata Humas	1
- Pranata Humas Muda	1
7. Pustakawan	1
- Pustakawan Mahir	1
8. Pranata Komputer	1
- Pranata Komputer pertama	1
9. Jabatan Fungsional Umum	36

Komposisi jabatan fungsional di BB Pengkajian didominasi oleh jabatan fungsional yaitu 56 orang dan 36 orang fungsional umum yang terdiri dari tenaga administrasi pendukung yang terdistribusi pada bidang atau bagian yang menangani urusan pada kegiatan program dan penganggaran, kerjasama penelitian dan pengkajian, diseminasi, teknologi informasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.

VISI, MISI, TUGAS POKOK DAN SASARAN

BB PENGKAJIAN

BB Pengkajian merupakan salah satu unit pelaksana teknis Eselon II Badan Litbang Pertanian, yang secara hirarkis merupakan *Bussines Unit* Balitbangtan. Berdasarkan *hierarchical strategic plan*, maka BB Pengkajian menyusun Rencana Aksi dari Visi, Misi, Kebijakan, dan Program Badan Litbang Pertanian, yang selanjutnya pada tataran rencana strategis BPTP/UPT (*functional unit*) dituangkan menjadi Rencana Operasional. Oleh karena itu, visi, misi, kebijakan, strategi, dan program Badan Litbang Misi Balitbangtan 2020 mengacu pada Visi dan Misi Kementerian Pertanian, yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk visi, misi, kebijakan, strategi, dan program seluruh satuan kerja Badan Litbang Pertanian, termasuk BB Pengkajian. Memperhatikan *hierarchical strategic plan*, maka visi dan misi BB Pengkajian adalah:

Visi Balai Besar Pengkajian :

“Menjadi Lembaga Penelitian Terkemuka Penghasil Teknologi dan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”

Misi Balai Besar Pengkajian :

1. Menghasilkan, mengembangkan dan mendiseminasikan inovasi pertanian spesifik wilayah sesuai dengan kebutuhan pengguna
2. Mengembangkan jejaring kerjasama nasional dan internasional dalam rangka peningkatan kapasitas pengkajian, pendayagunaan hasil pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian
3. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan norma dan standar metodologi pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian
4. Mengembangkan SDM yang profesional dan mandiri

Tugas Pokok Balai Besar Pengkajian : Melaksanakan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Sasaran Kegiatan Balai Besar Pengkajian :

1. Dimanfaatkannya hasil kajian dan pengembangan teknologi pertanian
2. Meningkatnya kualitas layanan publik Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
3. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Fungsi Balai Besar Pengkajian :

1. Pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi dan laporan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian
2. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan norma dan standar metodologi pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian
3. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan paket teknologi unggulan

4. Pelaksanaan analisis kebijakan teknologi pertanian
5. Pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan hasil pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian
6. Pelaksanaan pengembangan sistim informasi hasil pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian
7. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban

dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek**
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - Kewajiban Jangka Panjang**
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	32,500,000.00	32,500,000.00
Jumlah Pendapatan	32,500,000.00	32,500,000.00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	9,228,667,000.00	8,189,989,000.00
Belanja Lembur	96,046,000.00	30,724,000.00
Belanja Barang Operasional	2,532,101,000.00	2,643,655,000.00
Belanja Barang Non Operasional	7,908,582,000.00	3,153,547,000.00
Belanja Barang Persediaan	3,033,859,000.00	2,060,420,000.00
Belanja Jasa	2,634,500,000.00	984,785,000.00
Belanja Pemeliharaan	1,756,499,000.00	1,526,320,000.00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	5,474,250,000.00	3,990,617,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,835,060,000.00	227,263,000.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,164,940,000.00	192,424,000.00
Jumlah Belanja	35,664,504,000.00	22,999,744,000.00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp255,635,558.00 atau mencapai 786.57% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp32,500,000.00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0.00	68,739,500.00	0.00
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	32,500,000.00	105,794,773.00	325.52

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Pendapatan Lain-Lain	0.00	81,101,285.00	0.00
Jumlah	32,500,000.00	255,635,558.00	786.57

Realisasi Pendapatan TA 2021 mengalami penurunan sebesar -46.25% dibandingkan TA 2020. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	.%
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	68,739,500.00	3,080,000.00	2,131.80
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	105,794,773.00	79,369,000.00	33.29
Pendapatan Lain-Lain	81,101,285.00	393,123,747.00	-79.37
Jumlah	255,635,558.00	475,572,747.00	-46.25

Realisasi Pendapatan pada 30 Desember 2021 Rp255,635,558.00 atau sebesar 786.57% dari estimasi pendapatan :

1. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan sebesar Rp68,739,500.00 merupakan :
 - pendapatan dari setoran TP/TGR An. Sabilal Fahri, M.Si berupa pengembalian biaya tugas belajar sebesar Rp14,947,000.00
 - Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL yang merupakan Pengembalian atas Honor Narsum Eval. Proposal TA. 2020 Rp12,220,000.00
 - Pendapatan Penyelesaian TGR yang merupakan TGR Pengembalian biaya operasional kendaraan dinas (perbaikan sparepart) sebesar Rp20,405,000.00
 - Pendapatan Penyelesaian TGR yang merupakan Pengembalian BBNOL (Bahan Pendukung) Kegiatan Targrinov TA. 2021 sebesar Rp 3,920,000.00
 - Pendapatan Penyelesaian TGR yang merupakan TGR Pengembalian Honor Narsum Persiapan PENAS 10 Jan 2020 sebesar Rp 1,750,000.00
 - Pendapatan Penyelesaian TGR yang merupakan TGR Pengembalian Honor Narsum Keg. Bimtek Hortibunnak TA. 2020 Rp 12,697,500.00
 - Pendapatan Penyelesaian TGR yang merupakan TGR Pengembalian Honor Narsum Keg. Geltek PENAS TA.2020 Rp 2,800,000.00
2. Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar Rp105,794,773.00 merupakan :

- Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin Rp67.144.773,00 merupakan pendapatan dari hasil lelang barang milik negara yang sudah tidak digunakan.
 - Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan Rp18.000.000,00 merupakan pendapatan dari sewa gedung yang digunakan untuk cafe Tagrinov
 - Pendapatan Penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan Tusi Rp20,500,000.00 merupakan pendapatan dari sewa rumah tamu (guest house) yang mengalami peningkatan dibanding TA 2020 karena ada setoran kekurangan pembayaran guest house di tahun 2020 yang dibayarkan di tahun 2021. Terdapat penurunan sewa rumah tamu TA 2021 akibat dampak dari pandemi Covid-19.
 - Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya yang merupakan Hasil dari Penjualan Tanaman Sayuran Keg.Tagrinov 2021 sebesar Rp150,000.00
3. Pendapatan lain-lain sebesar Rp81.101.285,00 merupakan :
- Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp9.998.350,00 terdiri dari :
 - Pengembalian uang makan An. Syul N Lumintang sebesar Rp246.050,00
 - Pengembalian uang lembur bulan September – Nopember 2020 sebesar Rp 6.902.300,00
 - Pengembalian uang Jabatan Fungsional 2020 an. Titim R dan Anggita T sebesar Rp 2.850.000
 - Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp68.002.935,00, terdiri dari :
 - Pengembalian uang tiket perjalanan dinas TA 2020 sebesar Rp 875.435,00
 - Pengembalian kelebihan pembayaran Uang Paket Meeting Keg. VUB Benih TA 2020 Rp 2.070.000,00
 - Pengembalian kelebihan pembayaran Uang Paket Meeting Keg. Dupak Online 2020 Rp1.600.000,00
 - Pengembalian Honor Narasumber TA. 2020 Rp31.915.000,00
 - Pengembalian biaya operasional kendaraan dinas TA 2020 Rp28.100.000,00
 - Penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu, yaitu Pengembalian atas pekerjaan renovasi interior cafe kawitan sebesar Rp3.100.000,00

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2021 adalah sebesar Rp22,583,001,330.00 atau 98.19% dari anggaran belanja sebesar Rp22,999,744,000.00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2021

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	8,220,713,000.00	7,961,959,571.00	96.85
Belanja Barang	14,359,344,000.00	14,231,904,811.00	99.11
Belanja Modal	419,687,000.00	419,687,000.00	100.00
Total Belanja Kotor	22,999,744,000.00	22,613,551,382.00	98.32
Pengembalian Belanja		-30,550,052.00	0.00
Total Belanja	22,999,744,000.00	22,583,001,330.00	98.19

Dibandingkan dengan Tahun 2020, Realisasi Belanja TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 9.94% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Penurunan Realisasi Belanja Pegawai sebesar -3.52% disebabkan karena adanya refocusing/penghematan anggaran belanja pegawai.
2. Kenaikan Realisasi Belanja Barang sebesar 21.76% disebabkan kegiatan Pengkajian maupun kegiatan manajemen di Semester II sudah berjalan.
3. Penurunan Realisasi Belanja Modal Sebesar -33.52% disebabkan karena adanya refocusing/penghematan anggaran belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal Gedung bangunan untuk penanganan covid-19.

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	.%
Belanja Pegawai	7,948,559,030.00	8,238,329,393.00	-3.52
Belanja Barang	14,217,695,300.00	11,676,377,002.00	21.76
Belanja Modal	416,747,000.00	626,890,000.00	-33.52
Total Belanja	22,583,001,330.00	20,541,596,395.00	9.94

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp7,948,559,030.00 dan Rp8,238,329,393.00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan

pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar - 3.52% dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya refocusing/penghematan anggaran belanja Pegawai sehingga realisasi anggaran 31 Desember 2021 lebih kecil dari anggaran 31 Desember 2020.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	7,953,435,571.00	8,195,955,326.00	-2.96
Belanja Lembur	8,524,000.00	73,745,000.00	-88.44
Jumlah Belanja Kotor	7,961,959,571.00	8,269,700,326.00	-3.72
Pengembalian Belanja Pegawai	-13,400,541.00	-31,370,933.00	-57.28
Jumlah Belanja	7,948,559,030.00	8,238,329,393.00	-3.52

Jumlah Pegawai Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

No	Golongan	Jumlah PNS	Istri/Suami	Anak	Jumlah
1	I	2	2	4	8
2	II	11	9	14	33
3	III	53	40	63	157
4	IV	27	16	18	59
Jumlah		92	67	99	257

Pengembalian belanja pegawai sampai Triwulan III TA 2021 terdiri dari :

1. Pengembalian belanja tunjangan fungsional Rp5.116.000,00 terdiri dari Sigid handoko 980.000 x 3 bln = 2.940.000, Gita N 185.000 x 3 bln = 555.000, Mumuh muharam 540.000 x 3 bln = 1.620.000
2. Pengembalian belanja tunjangan struktural Rp8.285.462,00 terdiri dari Soegiarto 540.000 x 5 bln = 2.700.000, Ari M 540.000.x 5 bln = 2.700.000, Arnie m 540.000 x 5 bln = 2.700.000, Lingga 1 x 185.050 = 185.050, Jumema pengembalian pembulatan 250, Ermin wijaya pengembalian pembulatan 162.000

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp14,217,695,300.00 dan Rp11,676,377,002.00. Realisasi belanja barang TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 21.76% dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- a. Kenaikan belanja barang operasional sebesar 3.17% meliputi keperluan sehari-hari perkantoran, penambah daya tahan tubuh, pengadaan pakaian dinas, honor operasional pengelola anggaran, honor petugas kebersihan dan pramubakti,

satpam dan pengemudi, honor dokter dan tenaga kontrak. Adanya tambahan pengeluaran pada keperluan sehari-hari perkantoran dan penambah daya tahan tubuh sebagai dampak pandemi Covid 19 yaitu pembelian hand sanitizer, masker dan penambah daya tahan tubuh.

- b. Kenaikan belanja barang non operasional sebesar 37.83% meliputi belanja bahan pendukung kegiatan pengkajian dan kegiatan penanganan ekonomi nasional terkait dampak covid 19 serta upah tenaga kerja lapang yang sudah dibayarkan di Semester II TA 2021.
- c. kenaikan belanja barang persediaan sebesar 40.16% yang meliputi barang konsumsi, bahan untuk pemeliharaan dan bahan baku dikarenakan pengadaan untuk belanja barang persediaan dilakukan di awal kegiatan.
- d. Penurunan belanja jasa sebesar -16.18% meliputi jasa profesi, belanja sewa, langganan daya dan jasa. Penurunan belanja jasa dikarenakan adanya Penurunan Pagu Anggaran karena kebijakan Pemerintah.
- e. Penurunan belanja pemeliharaan sebesar -2.26% disebabkan karena fasilitas kantor seperti gedung dan bangunan, peralatan dan mesin sudah waktunya dilakukan pemeliharaan karena sudah memasuki masa manfaat penggunaan untuk mempertahankan aset tetap atau aset tetap lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi nilai kapitalisasi sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah dengan Peraturan Menteri Keuangan dilakukan pada semester I TA 2021.
- f. Kenaikan belanja perjalanan dalam negeri sebesar 45.25% meliputi perjalanan biasa, perjalanan dinas dalam kota, perjalanan dinas paket meeting dalam kota, perjalanan dinas paket meeting luar kota karena kegiatan pengkajian sudah mulai dilakukan percepatan di Semester II TA 2021.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	2,567,967,640.00	2,489,156,571.00	3.17
Belanja Barang Non Operasional	3,144,973,692.00	2,281,801,250.00	37.83
Belanja Barang Persediaan	2,050,242,627.00	1,462,785,521.00	40.16
Belanja Jasa	963,622,131.00	1,149,631,526.00	-16.18
Belanja Pemeliharaan	1,519,742,145.00	1,554,838,950.00	-2.26
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3,985,356,576.00	2,743,840,774.00	45.25
Jumlah Belanja Kotor	14,231,904,811.00	11,682,054,592.00	21.83
Pengembalian Belanja Barang	-14,209,511.00	-5,677,590.00	150.27
Jumlah Belanja	14,217,695,300.00	11,676,377,002.00	21.76

Terdapat pengembalian belanja barang sampai dengan Semester II tahun Anggaran 2021 sebesar Rp14,209,511.00 yaitu terdiri dari :

1. Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya kegiatan Tagrinov sebesar Rp3,360,000.00
2. Pengembalian honor narasumber kegiatan Bimtek Inovasi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar Rp2,380,000.00

3. Pengembalian honor narasumber kegiatan Bimtek Gerakan Petani Milenial sebesar Rp2,785,000.00
4. Pengembalian uang perjalanan dinas An. Joko Suparman sebesar Rp465,000.00
5. Pengembalian uang perjalanan dinas an. Didi N sebesar Rp415,000.00
6. Pengembalian BBNOL Bahan Pendukung Keg.Tagrinov 2021 sebesar Rp2.000.000,00
7. Pengembalian uang perjalanan dinas An. Rubiyo sebesar Rp2,031,000.00
8. Pengembalian uang perjalanan dinas Kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementan Rp110,000.00
9. Pengembalian belanja perjalanan Jogja 4 - 8 Mei 2021 keg. VUB Pajale (SPM 04-05-2021/314) Rp612,011.00
10. Pengembalian uang perjalanan dinas An. Ume H, Dkk sebesar Rp48,000.00
11. Pengembalian belanja Perjalanan kegiatan Hilirisasi 2021 sebesar Rp3,500.00

Belanja Pandemi Covid 19

Akun	Uraian	Anggaran	Realisasi 31 Desember 2021	%
521131	Belanja Barang Operasional- Penanganan Pandemi Covid 19	58,524,000.00	57,857,664.00	98.86
521241	Belanja Barang Non Operasional- Penanganan Pandemi Covid 19	431,475,000.00	431,129,000.00	99.91
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid 19	234,485,000.00	234,329,075.00	99.93
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid 19	212,365,000.00	211,633,152.00	99.65
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi Covid 19	498,900,000.00	498,871,766.00	99.99
Jumlah		1,435,749,000.00	1,433,820,657.00	99.86

Anggaran untuk Program Hilirisasi Teknologi dan Inovasi Balitbangtan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp1.150.000.000,00 terdiri dan realisasi sebesar Rp1,149,624,841.00 terdiri dari dari:

1. Belanja Barang Non Operasional - Penanganan pandemi Covid 19 dengan nilai anggaran Rp431,475,000.00, realisasi Rp431,129,000.00 digunakan untuk pembelian konsumsi, bahan pendukung, sewa kendaraan, gedung, alat dan fotocopy kegiatan Hilirisasi Teknologi dan Inovasi Balitbangtan
2. Belanja Barang Persediaan - Penanganan pandemi Covid 19 dengan nilai anggaran Rp181,625,000.00 realisasi Rp181,624,075.00 digunakan untuk pembelian ATK untuk mendukung kegiatan Hilirisasi Teknologi dan Inovasi Balitbangtan
3. Belanja Jasa - Penanganan pandemi Covid 19 dengan nilai anggaran Rp38,000,000.00 realisasi Rp38,000,000.00 digunakan untuk membiayai narasumber yang berasal dari instansi diluar kementerian pertanian kegiatan Hilirisasi Teknologi dan Inovasi Balitbangtan
4. Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan pandemi Covid 19 dengan nilai anggaran Rp498,900,000.00 realisasi Rp498,871,766.00 digunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam kegiatan Hilirisasi Teknologi dan Inovasi Balitbangtan

Anggaran pembayaran operasional terkait pelaksanaan operasional kantor sebesar Rp285,749,000.00 terdiri dari :

1. Belanja Barang Operasional - Penanganan pandemi Covid 19 dengan nilai anggaran Rp58,524,000.00 realisasi Rp57,857,664.00 digunakan untuk pembelian madu dan desinfektan seluruh kantor BB Pengkajian
2. Belanja Barang Persediaan – Penanganan pandemi Covid 19 dengan nilai anggaran Rp52,860,000.00 realisasi Rp52,705,000.00 digunakan untuk pembelian automatic handasnitizer, handsanitizer, desinfektan, brecket, masker sensi dan tissue kotak.
3. Belanja Jasa - Penanganan pandemi Covid 19 dengan nilai anggaran Rp174,365,000.00 realisasi Rp173,633,152.00 digunakan untuk tes kesehatan (rapid antigen dan PCR Swab)

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp416,747,000.00 dan Rp626,890,000.00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar -33.52% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	227,263,000.00	407,932,000.00	-44.29
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	192,424,000.00	218,958,000.00	-12.12
Jumlah Belanja Kotor	419,687,000.00	626,890,000.00	-33.05
Pengembalian Belanja Modal	-2,940,000.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	416,747,000.00	626,890,000.00	-33.52

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp227,263,000.00 dan Rp407,932,000.00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 mengalami penurunan sebesar -44.29% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya refocusing dan realokasi belanja untuk mendanai penanganan pandemic covid19

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	227,263,000.00	407,932,000.00	-44.29
Jumlah Belanja Kotor	227,263,000.00	407,932,000.00	-44.29

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Pengembalian Belanja	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	227,263,000.00	407,932,000.00	-44.29

B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp189,484,000.00 dan Rp218,958,000.00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 mengalami penurunan sebesar -13.46% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya refocusing dan realokasi belanja untuk mendanai penanganan pandemic covid19.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	192,424,000.00	218,958,000.00	-12.12
Jumlah Belanja Kotor	192,424,000.00	218,958,000.00	-12.12
Pengembalian Belanja	-2,940,000.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	189,484,000.00	218,958,000.00	-13.46

Terdapat pengembalian belanja modal disebabkan oleh kelebihan pembayaran atas pekerjaan renovasi pagar dan toilet tagrinov sebesar Rp2.940.000,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp22,013,000.00 dan Rp36,960,000.00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
per 31 Desember 2021

No	Nama Debitur	31 Desember 2021
1.	Sabilal Fahri, SP, M.Si	22,013,000.00
	Jumlah	22,013,000.00

Saldo bagian lancar merupakan biaya pendidikan tugas belajar yang tidak selesai dalam batas waktu yang ditetapkan yang harus disetor ke kas negara dalam waktu 1 tahun

C.1.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-110,065.00 dan Rp-184,800.00.

Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR
per 31 Desember 2021

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	22,013,000.00	0.5%	110,065.00
Jumlah	22,013,000.00		110,065.00

C.1.3. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp9,382,500.00 dan Rp26,635,700.00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang

diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Barang Konsumsi	9,382,500.00	18,235,700.00
Persediaan Lainnya	0.00	8,400,000.00
Jumlah	9,382,500.00	26,635,700.00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp14,236,513,416.00 dan Rp14,009,250,416.00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	14,009,250,416.00
Mutasi Tambah	
Pembelian	227,263,000.00
Saldo per 31 Desember 2021	14,236,513,416.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	-12,733,381,404.00
Nilai Buku per 31 Desember 2021	1,503,132,012.00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

Mutasi tambah senilai Rp227.263.000,00 berasal dari pembelian belanja modal peralatan dan mesin dan sudah terbit SK penetapan status penggunaan (PSP) Nomor 369/KPTS/PL.310/A/6/2021, yaitu :

- a. Pembelian rak-rak penyimpanan sebanyak 1 buah dengan nilai Rp1.685.000,00
- b. Pembelian CCTV sebanyak 4 buah dengan nilai Rp9.100.000,00
- c. Mesin Absensi sebanyak 2 buah dengan nilai Rp7.050.000,00
- d. A.C Split sebanyak 3 buah dengan nilai Rp21.300.000,00
- e. Equalizer sebanyak 1 buah dengan nilai Rp8.500.000,00
- f. Vertikal Blind sebanyak 6 buah dengan nilai Rp34.132.000,00
- g. Stabilizer/UPS sebanyak 1 buah dengan nilai Rp6.500.000,00
- h. Printer sebanyak 3 buah dengan nilai Rp10.950.000,00
- i. Router sebanyak 12 buah dengan nilai Rp75.104.000,00
- j. Kabel UTP sebanyak 2 buah dengan nilai Rp10.350.000,00
- k. Switch sebanyak 8 buah dengan nilai Rp42.592.000,00

C.2.2. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp15,347,212,515.00 dan Rp16,204,188,515.00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	16,204,188,515.00
Mutasi Tambah	
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	1,572,229,000.00
Pengembangan Melalui KDP	192,424,000.00
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-2,940,000.00
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	-2,618,689,000.00
Saldo per 31 Desember 2021	15,347,212,515.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	-2,176,714,239.00
Nilai Buku per 31 Desember 2021	13,170,498,276.00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan adalah berupa pengembangan melalui KDP berupa renovasi pagar dan toilet tagrinov sebesar Rp192.424.000,00

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa koreksi pencatatan nilai/kuantitas bangunan gedung dan bangunan akibat adanya pengembalian belanja modal tahun anggaran berjalan sebesar Rp2.940.000,00 yaitu : Pengembalian belanja gedung dan bangunan berupa renovasi pagar dan toilet tagrinov sebesar Rp2.940.000,00 disetorkan tanggal 21 April 2021 dengan kode NTPN 8F4A955DEDB9PQ6B

C.2.3. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1,544,823,300.00 dan Rp1,544,823,300.00. Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan pada Jalan, Irigasi, dan Jaringan karena pada Tahun 2021 tidak ada belanja modal untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

C.2.4. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp442,324,564.00 dan Rp442,324,564.00.

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian per 31 Desember 2021 dan 31 Desember

2020 adalah masing-masing sebesar Rp-15,858,712,678.00 dan Rp-14,030,723,204.00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	14,236,513,416.00	-12,733,381,404.00	1,503,132,012.00
2.	Gedung dan Bangunan	15,347,212,515.00	-2,176,714,239.00	13,170,498,276.00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,544,823,300.00	-948,617,035.00	596,206,265.00
4.	Aset Tetap Lainnya	442,324,564.00	0.00	442,324,564.00
Akumulasi Penyusutan		31,570,873,795.00	-15,858,712,678.00	15,712,161,117.00

C.3. PIUTANG JANGKA PANJANG

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp113,960,000.00 dan Rp113,960,000.00. Piutang Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan yang akan datang. Rincian Piutang Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Perbandingan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Nama	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1.	Sabilal Fahri, S.Pi, M.Si	113,960,000.00	113,960,000.00

C.3.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-569,800.00 dan Rp-569,800.00.

Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka panjang yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Penyisihan Piutang TP/TGR
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	113,960,000.00	0,5%	569,800.00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	0,00	100%	0,00

C.4. ASET LAINNYA

C.4.1. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp302,268,800.00 dan Rp302,268,800.00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian terdiri dari dua mini bus (Toyota Kijang Grand long KF 83 dan Mitsubishi kuda VB2W PL MT/Grandia) serta dua sepeda motor (Suzuki Ekonos A.100) dalam usulan proses penghapusan sudah di tindaklanjuti oleh Sekjen Kementerian Pertanian dan terbitnya SK Penghapusan BMN dengan nomor : 31/KPTS/PL.320/A/1/2022 pada tanggal 06 Januari 2022.

C.4.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-302,268,800.00 dan Rp-302,268,800.00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Lain-lain	302,268,800.00	-302,268,800.00	0.00
Akumulasi Penyusutan		302,268,800.00	-302,268,800.00	0.00

C.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.5.1. Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp19,829,333.00 dan Rp53,820,333.00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	19,829,333.00	53,820,333.00
Jumlah	19,829,333.00	53,820,333.00

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA									
		MULAI	SAMPAI	2019	2020	2021	2022	TOTAL BU	PER BULAN
			JUMLAH BULAN	8	12	12	4	36	
BRI	Rp50.979.000	01 MEI 2019	30-Apr-22	11.328.337	16.993.000	16.993.001	5.664.333	50.979.000	1.416.083
			JUMLAH BULAN	2	12	12	10	36	
BNI	RP50.994.000	1-Nov-19	31 OKTOBER 20	2.833.000	16.998.000	16.998.000	14.165.000	50.994.000	1.416.500
				14.161.667	33.991.000	33.991.000	19.829.333		
				Rp14.161.668	Rp33.991.001	Rp33.991.000	Rp19.829.333		

C.6. EKUITAS

C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp15,837,007,419.00 dan Rp18,292,844,358.00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp72,641,000.00 dan Rp62,366,000.00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	20,500,000.00	28,375,000.00	-27.75
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	150,000.00	0.00	0.00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	51,991,000.00	33,991,000.00	52.96
Jumlah	72,641,000.00	62,366,000.00	16.48

Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan Tusi merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari sewa rumah tamu (guest house) sebesar Rp20,500,000.00, pendapatan penjualan hasil produksi non litbang lainnya sebesar Rp150,000.00 yaitu berupa penjualan sayur mayur hasil kebun tagrinov, sedangkan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan merupakan pendapatan-LO yang diperoleh dari sewa bangunan yang digunakan untuk kafe tagrinov dan ATM yang sebesar Rp51,991,000.00. Terdapat selisih antarpendapatan sewa tanah, Gedung dan bangunan di LRA pendapatan senilai Rp18,000,000.00. Sementara di LO senilai Rp51,991,000.00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp33,991,000.00 yang disebabkan oleh jurnal penyesuaian untuk pendapatan diterima dimuka yang telah diterima manfaatnya di tahun anggaran 2021.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp7,948,559,030.00 dan Rp8,238,329,393.00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	4,929,674,760.00	5,119,620,900.00	-3.71
Beban Pembulatan Gaji PNS	61,762.00	63,017.00	-1.99
Beban Tunj. Anak PNS	99,711,462.00	102,631,126.00	-2.84
Beban Tunj. Beras PNS	263,463,960.00	235,220,160.00	12.01
Beban Tunj. Fungsional PNS	1,462,725,000.00	1,330,290,000.00	9.96
Beban Tunj. PPh PNS	103,724,970.00	90,087,394.00	15.14
Beban Tunj. Struktural PNS	34,184,538.00	114,330,000.00	-70.10
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	354,802,578.00	364,379,396.00	-2.63
Beban Tunjangan Umum PNS	99,575,000.00	95,799,400.00	3.94
Beban Uang Lembur	8,524,000.00	73,745,000.00	-88.44
Beban Uang Makan PNS	592,111,000.00	712,163,000.00	-16.86
Jumlah	7,948,559,030.00	8,238,329,393.00	-3.52

Jumlah pegawai pada Balai Besar Pengkajian mengalami Penurunan sebesar -3.52% dikarenakan adanya Pegawai yang mutasi dan Pensiun. Tidak terdapat selisih antara LO Beban Pegawai dengan LRA Belanja Pegawai.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2,014,145,427.00 dan Rp1,444,663,861.00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	946,000.00	1,389,600.00	-31.92
Beban Persediaan konsumsi	1,952,387,927.00	1,330,498,161.00	46.74
Beban persediaan lainnya	60,811,500.00	112,776,100.00	-46.08
Jumlah	2,014,145,427.00	1,444,663,861.00	39.42

Beban Persediaan bahan baku dan beban persediaan konsumsi merupakan alat tulis kantor berupa alat tulis, tinta, penjepit kertas, ordner dan map, cutter, pita mesin tik, alat perekat, stadler, alat pemotong, kertas, amplop, tinta/toner, Flashdisk/USB, lampulistrik, batu baterai dan alat tulis kantor lainnya sebagai bahan pendukung kegiatan. Beban persediaan mengalami kenaikan 39.42% dibandingkan tahun 2020 karena ATK sudah disalurkan kepada Stakeholders sesuai dengan kebutuhan. Terdapat beban persediaan yang masuk ke dalam akun beban pemeliharaan yaitu Beban Persediaan Bahan untuk

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2021

Pemeliharaan sebesar Rp53,350,400.00 sehingga total Beban Persediaan sebesar Rp2,067,495,827.00

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp6,666,038,463.00 dan Rp5,917,188,257.00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Bahan	1,118,282,730.00	653,962,500.00	71.00
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	431,129,000.00	0.00	0.00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,537,701,962.00	1,012,548,750.00	51.86
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	57,857,664.00	169,646,980.00	-65.90
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	179,540,000.00	144,535,000.00	24.22
Beban Honor Output Kegiatan	52,500,000.00	615,290,000.00	-91.47
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	211,633,152.00	424,361,000.00	-50.13
Beban Jasa Lainnya	60,000,000.00	11,000,000.00	445.45
Beban Jasa Profesi	187,035,000.00	318,850,000.00	-41.34
Beban Keperluan Perkantoran	2,232,608,476.00	1,884,852,666.00	18.45
Beban Langganan Air	77,251,500.00	56,565,000.00	36.57
Beban Langganan Listrik	301,292,300.00	326,091,095.00	-7.60
Beban Langganan Telepon	16,408,179.00	9,464,431.00	73.37
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	45,980,000.00	246,845,135.00	-81.37
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	51,981,500.00	39,875,700.00	30.36
Beban Sewa	104,837,000.00	3,300,000.00	3,076.88
Jumlah	6,666,038,463.00	5,917,188,257.00	12.66

Beban bahan digunakan untuk membiayai fotocopy dan perbanyak dokumentasi serta konsumsi dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan mengalamikenaikan sebesar 71% karena kegiatan yang melibatkan peserta dari luar kementerian pertanian seperti Bimtek dilakukan sampai Semester II TA 2021.

Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid digunakan untuk menjaga daya tahan tubuh pegawai melalui pembelian madu dan vitamin. Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid 19 dan belanja barang persediaan – penanganan pandemi covid 19 digunakan untuk mendukung program pemerintah penanganan ekonomi nasional berupa kegiatan Hilirisasi Teknologi dan Inovasi Balitbangtan melalui bimtek dan temu teknis. Belanja Jasa – Penanganan Pandemi Covid 19 digunakan untuk membiayai kegiatan rapid antigen dan PCR swab pegawai serta narasumber dari luar kementerian pertanian dalam kegiatan Bimtek dan Temu Teknis Hilirisasi Teknologi dan Inovasi Balitbangtan.

Beban Honor Operasional Satuan Kerja digunakan untuk membiayai honorarium pengelola anggaran yaitu pejabat kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan dan penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, bendahara penerima, staf pengelola anggaran, petugas SAIBA dan SIMAK BMN. Beban Jasa Profesi digunakan untuk membiayai narasumber sebagai dukungan dalam pelaksanaan kegiatan. Beban keperluan kantor digunakan untuk membiayai honor tenaga kontrak seperti pramubakti, satpam dan pengemudi, tenaga dokter, tenaga kontrak S1, pakaian dinas/seragam pegawai, pakaian petugas kebersihan/pramubakti dan pakaian satpam (beserta perlengkapannya). Beban Langganan Air, Listrik dan Telepon digunakan untuk membiayai operasional air, listrik dan telepon setiap bulannya.

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1,573,092,545.00 dan Rp1,605,895,950.00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	576,515,000.00	438,385,243.00	31.51
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	943,227,145.00	1,116,422,207.00	-15.51
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	53,350,400.00	51,088,500.00	4.43
Jumlah	1,573,092,545.00	1,605,895,950.00	-2.04

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan digunakan untuk membiayai pemeliharaan gedung/bangunan kantor dan halaman gedung. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin digunakan untuk membiayai pemeliharaan infocus, faximile, mesin tik manual, perawatan jaringan telepon, interkon dan PABX, perawatan peralatan audio sistem, lemari kayu, printer, personal komputer/notebook, AC Split, genset < 50 KVA, kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, peralatan jaringan dan instalasi air bersih/PAM, perawatan jaringan kelistrikan, jaringan LAN, operasional

kendaraan bermotor, tabung pemadam kebakaran, kamera digital dan perlengkapan video, pemeliharaan CCTV, serta perawatan mess Balitbangtan Cikeumeuh. Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan sebesar Rp53,350,400.00 merupakan beban persediaan yang masuk ke dalam akun beban pemeliharaan.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3,981,672,065.00 dan Rp2,741,595,774.00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	3,209,657,299.00	1,991,701,822.00	61.15
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	585,694,766.00	0.00	0.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	133,800,000.00	45,860,000.00	191.76
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0.00	65,500,000.00	-100.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	52,520,000.00	638,533,952.00	-91.77
Jumlah	3,981,672,065.00	2,741,595,774.00	45.23

Beban Perjalanan Dinas terdiri dari Beban Perjalanan Biasa, Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota, Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota dan Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota digunakan menunjang kegiatan pada Balai Besar Pengkajian yang dilakukan di luar kantor baik untuk kegiatan pengkajian dan diseminasi maupun kegiatan yang menyangkut administrasi kegiatan mengalami kenaikan sebesar 45.23%.

D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp2,179,781,769.00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0.00	1,561,883,369.00	-100.00
Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0.00	271,500,000.00	-100.00
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0.00	30,800,000.00	-100.00
Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0.00	246,102,000.00	-100.00
Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	0.00	69,496,400.00	-100.00
Jumlah	0.00	2,179,781,769.00	-100.00

Tidak ada pagu anggaran persediaan untuk dijual/diserahkan ke masyarakat.

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1,378,872,965.00 dan Rp1,685,365,471.00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	380,852,462.00	407,650,485.00	-6.57
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	120,253,114.00	120,253,114.00	0.00
Beban Penyusutan Jaringan	13,701,706.00	13,701,706.00	0.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	864,065,683.00	1,143,760,166.00	-24.45
Jumlah	1,378,872,965.00	1,685,365,471.00	-18.19

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak

Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-74,735.00 dan Rp754,600.00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	-74,735.00	184,800.00	-140.44
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0.00	569,800.00	-100.00
Jumlah	-74,735.00	754,600.00	-109.90

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Rp-74,735.00 merupakan Pembentukan Penyisihan Piutang Jangka Panjang.

D.11. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0.00	0.00	0.00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0.00	-21,527,500.00	-100.00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	53,792,500.00	154,000,000.00	-65.07
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0.00	37,165,090.00	-100.00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	67,144,773.00	0.00	0.00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	68,002,935.00	306,445,228.00	-77.81
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	3,100,000.00	18,552,280.00	-83.29

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	9,998,350.00	68,126,239.00	-85.32
Jumlah	202,038,558.00	562,761,337.00	-64.10

- Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara sebesar Rp53.792.500,00 merupakan pembentukan atas pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara yang harus diselesaikan di tahun 2021. Berdasarkan LO dan LRA atas Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terdapat selisih sebesar Rp14.947.000,00 yaitu berupa selisih dari pembentukan TGR atas audit TA 2021 senilai Rp53.792.500,00 yang sudah diselesaikan pembayarannya di Semester II dengan setoran atas penyelesaian TGR TA 2020 An. Sabial Fahri senilai Rp14.947.000,00.
- Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp67.144.773,00 merupakan pendapatan dari lelang BMN yang sudah tidak digunakan. Penerimaan kembali belanja barang TAYL merupakan.
- Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp9.998.350,00 terdiri dari :
 - Pengembalian uang makan An. Syul N Lumintang sebesar Rp246.050,00
 - Pengembalian uang lembur bulan September – Nopember 2020 sebesar Rp 6.902.300,00
 - Pengembalian uang Jabatan Fungsional 2020 an. Titim R dan Anggita T sebesar Rp 2.850.000
- Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp68.002.935,00, terdiri dari :
 - Pengembalian uang tiket perjalanan dinas TA 2020 sebesar Rp 875.435,00
 - Pengembalian kelebihan pembayaran Uang Paket Meeting Keg. VUB Benih TA 2020 Rp 2.070.000,00
 - Pengembalian kelebihan pembayaran Uang Paket Meeting Keg. Dupak Online 2020 Rp1.600.000,00
 - Pengembalian Honor Narasumber TA. 2020 Rp31.915.000,00
 - Pengembalian biaya operasional kendaraan dinas TA 2020 Rp28.100.000,00
- Penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu, yaitu Pengembalian atas pekerjaan renovasi interior cafe kawitan sebesar Rp3.100.000,00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp18,292,844,358.00 dan Rp21,428,464,712.00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp-23,287,626,202.00 dan Rp-23,188,447,738.00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-1,495,576,509.00 dan Rp-13,196,264.00.

E.3.1. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-1,495,576,509.00 dan Rp-13,196,264.00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2021.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2021
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-449,116,509.00
Gedung dan Bangunan	-1,049,400,000.00
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	2,940,000.00
Jumlah	-1,495,576,509.00

Koreksi nilai aset tetap/lainnya non revaluasi merupakan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan karena adanya koreksi nilai gedung dan bangunan akibat pengembalian belanja renovasi gedung dan bangunan berupa renovasi pagar dan toilet tagrinov tanggal 21 April 2021 dengan kode NTPN 8F4A955DEDB9PQ6B

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp22,327,365,772.00 dan

Rp20,066,023,648.00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2021.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2021
Ditagihkan ke Entitas Lain	22,583,001,330.00
Diterima dari Entitas Lain	-255,635,558.00
Jumlah	22,327,365,772.00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2021 saldo DDEL adalah sebesar Rp-255,635,558.00 sedangkan DKEL sebesar Rp22,583,001,330.00.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-2,455,836,939.00 dan Rp-3,135,620,354.00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Terdapat koreksi nilai aset tetap non revaluasi sebesar Rp940.800,00 merupakan akumulasi penyusutan dari koreksi nilai gedung dan bangunan berupa renovasi pagar dan toilet tagrinov akibat pengembalian belanja modal karena kelebihan pembayaran

F.2. Pengungkapan Lain-lain

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tanggal 12 Nopember 2019 awal Balai Besar Pengkajian sebesar Rp35,664,504,000,00. Balai Besar Pengkajian telah melakukan enam kali revisi DIPA sebagai berikut :

1. Revisi DIPA I tanggal 17 Februari 2021 disebabkan adanya refocusing anggaran untuk program vaksinasi dan penanganan covid 19 sesuai Surat Menkeu No: S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 hal Refocusing dan Realokasi Belanja K/L TA 2021
2. Revisi DIPA II tanggal 19 Maret 2021 disebabkan adanya tambahan anggaran untuk PPNPN
3. Revisi DIPA III tanggal 26 Maret 2021 disebabkan adanya tambahan kegiatan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
4. Revisi DIPA IV tanggal 10 Mei 2021 berupa revisi POK (pemuktahiran data)
5. Revisi DIPA V tanggal 18 Juni 2021 disebabkan adanya tambahan alokasi anggaran dari Sekretariat Badan Litbang Pertanian.
6. Revisi DIPA VI tanggal 21 Juli 2021 disebabkan adanya Refocusing anggaran untuk mendanai pandemi covid19 sesuai dengan surat Menkeu No.S-584/MK.02/2021 tanggal 6 Juli 2021 hal Refocusing dan Realokasi Belanja K/L TA. 2021
7. Revisi DIPA VII tanggal 05 Agustus 2021 disebabkan adanya Refocusing anggaran untuk penanganan Kesehatan dan perlindungan social kepada masyarakat sebagai dampak pelaksanaan PPKM darurat sesuai dengan Menkeu No.S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021 hal Refocusing dan Realokasi Belanja K/L TA. 2021 Tahap IV
8. Revisi DIPA VIII tanggal 26 Agustus 2021 disebabkan adanya Revisi dan Realokasi anggaran dalam rangka Peningkatan Sarana Prasarana dan diseminasi lingkup BBP2TP dan penambahan anggaran untuk kegiatan pengawalan bimbingan teknis Penyuluh dan Petani (telah dilakukan reuiu 28 Juni 2021)